

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada abad ke-21 ini, setiap negara tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan negara lain maupun peran organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan subyek dari hukum internasional yang menjadivadah untuk menghimpun negara-negara dalam melakukan adanya kerjasama dalam bidang internasioanl. Perannya sangat dirasakan oleh masyarakat internasional karena bukan saja meningkatkan kepentingan negara saja, perannya diharapkan dapat menjaga stabilitas di lingkungan internasional (Cornelesz, 2018). Oleh karena itu, organisasi internasional yang dibentuk sangat penting bagi hampir semua negara demi mencapai tujuannya yang menyangkut kehidupan internasional dalam segala aspek.

Tepat pada saat perang dunia kedua berakhir, organisasi internasional yang pertama muncul adalah *The United Nations* atau sering disebut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), organisasi ini diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Perserikatan bangsa-bangsa telah berevolusi selama bertahun-tahun untuk mengimbangi dunia yang berubah dengan cepat. Keanggotaan PBB telah berkembang dari 51 Negara Anggota pada tahun 1945 menjadi 193 Negara Anggota saat ini. Semua Negara Anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Negara-negara diakui sebagai anggota melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan (United Nations, 1995).

United Nations adalah bagian dari sistem PBB itu sendiri. Sistem ini terdiri dari banyaknya dana, program, dan badan khusus, yang masing-masing memiliki bidang kerja, kepemimpinan, dan anggaran sendiri. Program dan dana dibiayai melalui kontribusi sukarela dan bukan kontribusi yang terukur. PBB mengoordinasikan pekerjaannya dengan entitas sistem PBB yang terpisah, selain itu PBB bekerja sama dengan organisasi lain maupun pemerintahan negara untuk membantunya mencapai keberhasilan dari tujuannya. PBB memiliki banyak organisasi kecil dibawahnya dengan peran khususnya masing-masing (United Nations, 1995)

Dengan era yang semakin berkembang, maka berbagai masalah baru terus bermunculan dan menarik perhatian dunia. Salah satunya menyangkut para perempuan yang menjadi korban peristiwa di negara-negara tertentu. Isu perempuan terus berkembang dan menjadi perhatian akan kurangnya kesadaran dunia tentang melindungi hak-hak perempuan yang masih rendah. Hingga akhirnya muncul kesadaran untuk menghapus kekerasan, melindungi perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan di dunia, hal ini mendorong *United Nations* (UN) membentuk organisasi dibawahnya yaitu *United Nations Women* (*UN Women*). *UN Women* adalah entitas dari *United Nations* (UN) yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. *UN Women* didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan di seluruh dunia. Organisasi ini mendukung negara anggota PBB saat mereka menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender. *UN Women* juga bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang

undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Hal ini bekerja secara global untuk membuat visi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi kenyataan bagi perempuan dan anak perempuan yang berdiri di belakang partisipasi perempuan yang setara dalam segala aspek kehidupan (UN Women, 2010)

Hak seorang perempuan tidak hanya memperjuangkan hak asasi manusia saja, tetapi pencapaiannya dalam konsekuensi sosial-ekonomi yang sangat besar. Pemberdayaan terhadap perempuan memicu pertumbuhan ekonomi, memacu produktivitas dan pertumbuhan. Namun adanya ketidaksetaraan tetap tertanam kuat di setiap masyarakat. Perempuan tidak memiliki akses dalam pekerjaan yang layak dan menghadapi segregasi pekerjaan dan kesenjangan upah. Perempuan di seluruh belahan dunia mengalami kekerasan dan diskriminasi yang terus-menerus meningkat. Mereka kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan dan ekonomi yang berkelanjutan (UN Women, 2010)

Terbentuknya *UN Women* merupakan wujud nyata dari langkah bersejarah yang diambil oleh PBB untuk mempercepat pencapaian tujuan Organisasi tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. *UN Women* selalu memastikan bahwa isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tetap menjadi isu utamanya. *UN Women* memiliki banyak program-program yang membantu para perempuan dan anak perempuan di berbagai negara. Organisasi ini mengimplementasikan programnya di tingkat nasional, multinasional dan regional melalui mitra pelaksana, termasuk entitas pemerintah, organisasi non-pemerintah, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, dan organisasi

antar pemerintah (UN Women, 2010)

Bangladesh memiliki sejarah yang signifikan dalam gerakan pengorganisasian perempuan dalam menuntut hak-hak mereka. Selama bertahun-tahun, kelompok perempuan telah memobilisasi diri mereka dan memastikan suaranya didengar dalam berbagai isu, mulai dari kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan gender dalam mengamankan peluang untuk berpartisipasi ekonomi, keterwakilan yang setara dalam politik, hak reproduksi, reformasi hukum keluarga, dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (UN Women, n.d.). Perempuan berdasarkan status dan peran mereka merupakan sumber solusi dari perubahan iklim. Penting untuk menggunakan pengetahuan, kapasitas, dan keterampilan mereka untuk beradaptasi dalam memitigasi perubahan iklim.

The United Nations Environment Programme (UNEP) telah menjadi otoritas global yang menetapkan agenda pada isu lingkungan, dengan mengimplementasikan dimensi lingkungan dari pembangunan berkelanjutan dalam sistem PBB dan berfungsi sebagai advokat otoritatif untuk lingkungan global. Misi dari UNEP adalah memberikan dukungan dalam kepemimpinan dan mendorong kemitraan untuk merawat lingkungan dengan menginspirasi, menginformasikan, dan memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini bertujuan untuk memberikan dorongan dalam perubahan transformasional bagi manusia dan alam dengan mencari akar penyebab dari tiga krisis planet seperti perubahan iklim (UNEP, 1993).

UNEP bekerja dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dalam mengejar pertumbuhan yang mendorong penggunaan aset alam kawasan secara efisien, mengurangi degradasi lingkungan, memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di kawasan tersebut. Pada tingkat nasional UNEP

bekerjasama dengan otoritas nasional dan lokal, masyarakat sipil, entitas PBB, lembaga keuangan, badan dan jaringan regional, lembaga penelitian, dan sektor swasta. UNEP juga mendukung negara-negara dalam mengubah ekonomi dan masyarakat mereka menjadi ekonomi yang inklusif, adil, dan lebih terhubung dengan alam (UNEP, 1993a).

Perubahan iklim merupakan masalah keamanan global yang menjadi tantangan serius bagi pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, pemerataan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perubahan iklim menjadi konsekuensi yang mempengaruhi semua entitas yang ada di bumi, dampak perubahan iklim diperkirakan akan menimpa sebagian besar wilayah dan tidak secara proporsional pada negara-negara berkembang. Banyak dari negara-negara tersebut rentan terhadap dampak dari perubahan iklim seperti kemiskinan, konflik, kurangnya kesetaraan gender dan sosial, degradasi lingkungan dan kekurangan pangan (Latifah, 2018). Selain itu, pada tahun 2017 dampak antara indeks resiko iklim sering mengalami siklon 76.38%, badai meningkat, banjir 47.82%, erosi tepi sungai 25.32% dan kekeringan berkala. Curah tahunan Bangladesh dapat mencapai 2.000mm selama musim hujan, yang dapat menyebabkan banjir di daerah-daerah basah yang dikelola dengan tidak benar di delta regional (Bangladesh Bureau of Statistics, 2022).

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengatakan bahwa negara-negara berkembang adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim karena kurangnya sumber daya seperti teknologi dan keuangan untuk adaptasi dan mitigasi. Dalam hal tenaga kerja di Bangladesh, daerah pedesaan menyumbang 63% dari populasi yang bergantung pada pertanian untuk penghidupan mereka. Dalam data *Labour Force Survey 2016-*

2017 *Bangladesh Bureau Statistic* (BBS) pekerjaan informal mendominasi di negara ini dan di tingkat nasional di mana 85,1% penduduk yang bekerja terlibat dalam pekerjaan informal (Bangladesh Bureau of Statistics, 2022) Selain itu, jumlah masyarakat dengan pekerjaan tidak tetap atau informal terus bertambah dan tingkat pengangguran yang tinggi dengan rata-rata usia muda, ekonomi di kalangan perempuan di Bangladesh menunjukkan peringkat ke-76 (Latifah, 2018).

Di Bangladesh, kerentanan tersebut terletak pada kenyataan bahwa perempuan memiliki tingkatan dibawah laki-laki, seperti tidak memiliki akses kepemilikan dan kendali atas sumber daya yang dimiliki, juga lebih sedikit dalam peluang mata pencaharian. Meskipun presentase usia kerja perempuan terus meningkat, mereka tidak mendapatkan lingkup yang sama dari bekerja saat ini. Presentase pengangguran perempuan di usia kerja lebih banyak 64,63% dibandingkan dengan laki-laki 18,49%. Dipedesaan 38,6% perempuan di usia kerja mendapatkan pekerjaan dibandingkan laki-laki 80,3%, sedangkan didaerah perkotaan bahkan lebih buruk tingkat laki-laki lebih tinggi 81,51% (BBS, 2021). Artinya dapat diketahui bahwa perempuan memiliki akses kedalam pekerjaan lebih sedikit daripada laki-laki.

Perempuan seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan dan informasi, isu-isu ini digabungkan dengan data berulang terhadap perempuan dari kurangnya pemberdayaan ekonomi. Perempuan menemukansedikit kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan (Alam et al., 2017). Secara khusus, dampak perubahan iklim terhadap pertanian dan sektor lainnya sudah terlihat jelas. Sektor pertanian kemungkinan besar akan menghadapi penurunan hasil yang signifikan dimasa depan karena variabilitas iklim. Pertanian pangan adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim diantara berbagai sektor ekonomi

Bangladesh. Salah satu penentu utama dari fluktuasi hasil panen adalah perubahan variabel iklim dari tahun ke tahun. Hal ini menyatakan bahwa hubungan antara perubahan iklim dan pertanian sangat kompleks dan bermacam-macam, melibatkan aspek iklim dan lingkungan, respon sosial dan ekonomi (Sikder & Xiaoying, 2014)

Perempuan di wilayah Bangladesh sebagian besar mengandalkan pertanian skala kecil, beternak, beternak unggas, untuk mata pencaharian mereka. Dengan masalah terkait iklim yang memengaruhi pertanian, perempuan dari rumah tangga miskin sangat terpukul. Stres iklim dan penurunan pendapatan yang diakibatkannya juga menyebabkan peningkatan migrasi pria dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, seringkali meninggalkan para perempuan. Gambaran ini semakin rumit, memang saling ketergantungan antara perubahan iklim dan pertanian yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu, sering kali mencakup skala waktu, ruang yang besar dan masih dikelilingi oleh ketidakpastian (Rafe, 2022).

Perubahan iklim mengakibatkan banjir di wilayah Bangladesh yang menyapu bersih panen para petani perempuan sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan konsumsi, selain itu akses air bersih yang kurang, kehilangan tempat tinggal, sehingga hal ini kurang mendapatkan perawatan yang baik bagi kehidupan. Akibat dari hal ini banyak dari anak-anak mereka terkena dampaknya seperti putus sekolah yang mengharuskan anak-anaknya ikut bekerja demi mencukupi kebutuhan, seringkali tempat mereka rawan terjadi bencana. Statistik menunjukkan bahwa 1,7 juta anak di Bangladesh terpaksa putus sekolah untuk bekerja, dan proporsi anak berusia 11 tahun ke bawah adalah satu dari empat (Kiany, 2022) Hal ini cukup penting berkaitan dengan partisipasi perempuan

dalam upaya adaptasi perubahan iklim, terutama peran pemberdayaan perempuan.

Dengan menyadari kebutuhan yang relevan saat ini, *UN Women* dan *United Nations Environment Programme* bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya, pemerintahan, dan organisasi masyarakat sipil dalam pemberdayaan perempuan di Bangladesh. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan keterampilan mereka dalam mengatasi perubahan iklim. Pemberdayaan ini merupakan proses penyadaran dan pembangunan kapasitas (*capacity building*) untuk meningkatkan partisipasi seperti penjangkauan, pemantauan dan pengambilan keputusan, serta tindakan transformatif lainnya.

Melalui program *EmPower “Women for Climate Resilient Societies”* *UN women* bekerja sama dengan *UN Environment Program (UNEP)* dan *The Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)* bersama-sama mendukung para perempuan untuk berjuang, bertahan hidup dalam perubahan iklim melalui pemberdayaan yang diberikan (*UN Women Asia and the Pacific, 2018*). Program *EmPower* berusaha menjadi wadah bagi para perempuan untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, Meningkatkan ketanggaan dalam kebijakan pengurangan risiko iklim dan bencana, Memungkinkan perempuan untuk menggunakan energi terbarukan sebagai sumber daya ekonomi untuk mata pencaharian dan terakhir adalah meningkatkan mekanisme, proses dan pengetahuan regional tentang perubahan iklim juga pengurangan risiko bencana (*EmPower, 2018*).

Penelitian ini penting untuk diteliti karena kurangnya pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan di Bangladesh. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan perempuan sebagai pengelola terbaik dalam menangani masalah perubahan iklim. Perempuan berkesempatan untuk meningkatkan kualitas dilingkungannya, seperti menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membentuk sikap dan perilaku untuk mewujudkan kualitas dalam mengerjakan sesuatu. Pemberdayaan perempuan telah didokumentasikan mempengaruhi efisiensi teknik pertanian, industri, pilihan pengeluaran, pengadaan, kualitas dan hasil gizi rumah tangga. Meskipun demikian, hal baru pada pemberdayaan perempuan telah muncul dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya peluang untuk industri baru di luar rumah dan meningkatnya partisipasi dalam pekerjaan upah di bidang pertanian, dan perluasan jaringan sosial perempuan.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Kerjasama UN Women-UNEP melalui Program *EmPower: Women for Climate Resilient Societies di Bangladesh*”**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu, “Bagaimana implementasi program *EmPower “Women for Climate Resilient Societies* dari UN Women dan UNEP dalam pemberdayaan perempuan di Bangladesh akibat perubahan iklim”.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yang memfokuskan pada kerjasama UN Women dan UNEP melalui Program *EmPower “Women for Climate Resilient Societies”* untuk pemberdayaan perempuan melalui partisipasi para perempuan bersama dengan organisasi masyarakat sipil di Bangladesh yang berakibat dari perubahan iklim. Penulis akan membatasi masalah tersebut dari tahun 2018-2022, hal ini berfokus pada pengambilan program fase pertama pada tahun 2018 hingga tahun 2022 di Bangladesh. Selain itu tahun 2017 merupakan tahun dengan cuaca perubahan iklim yang ekstrim sehingga dibuatlah program dengan jangka 5 tahun pertama untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim yang terjadi di Bangladesh.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Mengetahui kerjasama antara UN Women dan UNEP
- 2) Mengetahui dampak perubahan iklim terhadap perempuan di Bangladesh.
- 3) Mengetahui implementasi program *EmPower “Women for Climate Resilient Societies”* dalam pemberdayaan melalui partisipasi perempuan di Bangladesh akibat dari perubahan iklim.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Dalam kegunaan teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsi berupa wawasan yang khususnya dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional tentang bagaimana para perempuan di Bangladesh dapat menjalani kehidupannya untuk mencari mata pencaharian, sedangkan negara mereka dilanda oleh perubahan iklim. Selain itu juga penulis ingin memberikan wawasan tentang apa saja hal yang melatarbelakangi hal tersebut dan bagaimana Kerjasama antara UN Women-UNEP dalam menangani permasalahan perempuan akibat dari perubahan iklim di Bangladesh melalui program-program yang diberikan.
2. Dapat berguna khususnya bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional dalam mengkaji fenomena internasional terkait sifat suatu negara dan peran Organisasi Internasional, khususnya di Bangladesh mengenai fenomena dari perubahan iklim. Selain itu, dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun bagi masyarakat secara umum.
3. Terakhir penelitian ini merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban dalam menempuh program studi S-1. Yaitu, dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan.